

PROBLEM PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DI INDONESIA

Hesti¹, Kurniansyah², Zulfadli Rizki³

^{1,2,3}Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas; hesti@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received 2022-12-1

Revised 2022-12-8

Accepted 2022-12-11

ABSTRAK

Pluralisme suku, agama, ras, golongan, yang seharusnya menjadi modal pembangunan, seringkali dimanipulasi oleh penguasa untuk mencapai kepentingan politiknya. Oleh karena itu, ketika konflik pecah di kawasan, negara seolah menutupi realitas keragaman ini atas nama "persatuan nasional" atau "stabilitas nasional. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif dengan jenis penelitian library research. Adapun dalam pengumpulan data menggunakan buku, artikel jurnal, dan website yang relevan dengan judul penelitian. Hasil penelitian dari hasil penelusuran dengan analisis berbagai referensi menyebutkan bahwa problema kemasyarakatan pendidikan multikultural di Indonesia antara lain: keragaman Identitas Budaya Daerah, Pergeseran Kekuasaan dari Pusat ke Daerah, Fanatisme Sempit, Kurang Kokohnya Nasionalisme, konflik Kesatuan Nasional dan Multikultural, Kesejahteraan Ekonomi yang Tidak Merata di antara Kelompok Budaya, Rendahnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan, Ketidak Jelasan Tujuan Pendidikan, Adanya Pengukuran Yang Salah Ukur dan Ketidak Serasian Kurikulum

Kata Kunci: Problem Pendidikan Multikultural

ABSTRACT

Pluralism of ethnicity, religion, race, class, which should be the capital of development, is often manipulated by the authorities to achieve their political interests. Therefore, when conflicts break out in the region, the state seems to cover up the reality of this diversity in the name of "national unity" or "national stability. This research method uses qualitative research with the type of liberal research. As for data collection, it uses books, journal articles, and websites relevant to the research title. The results of the research with the analysis of various references state that the societal problems of multicultural education in Indonesia include: diversity of regional cultural identities, shifts of power from the center to the regions, narrow fanaticism, lack of solid nationalism, conflicts of national and multicultural unity, Unequal Economic Prosperity Among Cultural Groups, Low Quality of Educational Facilities and Infrastructure, Unclear Educational Objectives, Incorrect Measurements and Curriculum Mismatches.

Keyword: *The Problem of Multicultural Education*

This is an open access article under the [CC BY](#) license.



Corresponding Author:

Hesti

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas; hesti@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Sejak lama seluruh bangsa Indonesia diingatkan untuk selalu hidup berdampingan secara damai dalam masyarakat yang berbeda suku, agama, ras dan golongan. Sesuai semboyan Bhinneka Tunggal Ika, kita dipanggil untuk memahami, menghayati dan mewujudkan hidup bersama untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Artinya, kita selalu diingatkan untuk menghargai dan menjunjung tinggi perbedaan SARA (Fadli, 2021; Sitompul, 2008). Faktor utama pemersatu negara ini, bukan dijadikan alasan untuk berkonflik. Dalam ilmu sosial, mengajarkan mereka tentang hidup berdampingan secara damai merupakan salah satu bentuk sosialisasi nilai-nilai yang dianut oleh multikulturalisme. Kesadaran akan pentingnya keragaman muncul ketika upaya nasionalis negara gagal, yang dikritik karena lebih menekankan persatuan daripada keragaman. Pluralisme suku, agama, ras, golongan, yang seharusnya menjadi modal pembangunan, seringkali dimanipulasi oleh penguasa untuk mencapai kepentingan politiknya. Oleh karena itu, ketika konflik pecah di kawasan, negara seolah menutupi realitas keragaman ini atas nama "persatuan nasional" atau "stabilitas nasional". Konflik sosial seringkali muncul karena pengingkaran terhadap realitas pluralisme dan sebab-sebab konflik social (Salsabila, Rohmadani, Mahmudah, Fauziyah, & Sholihatien, 2022; Sudargini & Purwanto, 2020)

Berangkat dari fakta tersebut, kini muncul kebutuhan yang semakin besar akan kebijakan multikultural yang kondusif bagi keberagaman (Khairuddin & Si, 2018; Nugroho, 2016). Melihat fakta ini, semoga masyarakat mengelola perbedaan dengan cara yang positif. Dengan demikian, alih-alih menimbulkan prasangka atau konflik, perbedaan di segala bidang kehidupan mendorong masyarakat untuk bergerak ke arah yang lebih baik. Pendidikan multikultural pada hakekatnya adalah pendidikan yang menekankan pada proses pengembangan cara hidup yang menghargai, otentik, dan toleran terhadap keragaman budaya dalam masyarakat yang sangat beragam. Melalui model pendidikan ini diharapkan masyarakat Indonesia dapat menerima, bertoleransi dan menghargai keberagaman yang ada di Indonesia. Dalam dunia pendidikan multikultural (Halimatussa'diyah, 2019), Seorang pendidik tidak hanya harus profesional di bidang akademik, tetapi juga mampu menanamkan nilai-nilai inti pendidikan multikultural yaitu demokrasi, kemanusiaan dan kebinekaan.

Adapun latar belakang diatas maka dapat kita tarik rumusan masalah sebagai berikut yaitu mendiskripsikan dan menganalisis konsep pendidikan multicultural dan bagaimana problematika pendidikan multicultural di Indonesia.

2. METODE

Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis library research. Tujuan dari kegunaan tertentu menunjukkan arti bahwa kegiatan penelitian didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional dalam penelitian adalah bahwa penelitian dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, bukan

hasil mediasi. Empiris adalah bahwa kegiatan penelitian dapat diamati oleh indera manusia sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Adapun sistematis adalah bahwa proses yang digunakan dalam penelitian menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Sumber data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua macam data, yaitu data primer dan data sekunder. Data Primer yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengembalian data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari. Data sekunder Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak secara diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Untuk mendapatkan data sekunder dilakukan dengan melalui studi kepustakaan yang berisikan informasi tentang primer, terutama bahan pustaka, melalui literatur-literatur dari buku pustaka, karya ilmiah. Data Sekunder yang digunakan adalah buku, jurnal, buku. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsepsi Pendidikan Multikultural

Pendidikan multikultural berasal dari dua kata pendidikan dan multikultural. Pendidikan merupakan proses pengembangan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui pengajaran, pelatihan, proses, perbuatan dan cara-cara yang mendidik. Disisi lain Pendidikan adalah *Transfer of knowledge* atau memindah ilmu pengetahuan. Sebagai sebuah cara pandang sekaligus gaya hidup, multikulturalisme menjadi gagasan yang cukup kontekstual dengan realitas masyarakat kontemporer saat ini. Prinsip mendasar tentang kesetaraan, keadilan, keterbukaan, pengakuan terhadap perbedaan adalah prinsip nilai yang dibutuhkan manusia ditengah himpitan budaya global. Oleh karena itu, sebagai sebuah gerakan budaya, multikulturalisme adalah bagian integral dalam berbagai sistem budaya dalam masyarakat yang salah satunya dalam pendidikan, yaitu melalui pendidikan yang berwawasan multikultural. Pendidikan dengan wawasan multikultural dalam rumusan James A. Bank adalah "konsep, ide, atau falsafah sebagai suatu rangkaian kepercayaan dan penjelasan yang mengakui dan menilai pentingnya keragaman budaya dan etnis di dalam membentuk membentuk gaya hidup, pengalaman sosial, identitas pribadi, kesempatan-kesempatan pendidikan dari individu, kelompok maupun negara"(Bank, 1990). Sedangkan menurut (H.A.R, 2013) pengertian tentang multikulturalisme setidaknya mengandung dua pengertian yang sangat kompleks yaitu "*multi*" yang berarti plural, "*kulturalisme*" berisi pengertian kultur atau budaya. Istilah plural mengandung arti yang berjenis-jenis, karena pluralisme bukan berarti sekedar pengakuan akan adanya hal-hal yang berjenis, namun pengakuan yang memiliki implikasi-implikasi politis, sosial dan ekonomi. Oleh sebab itu pluralisme bersangkutan dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Mundzier Suparta dalam bukunya *Islamic Multicultural Education*, mencatat lebih dari sepuluh definisi tentang pendidikan multicultural (Suparta, 2008) diantaranya adalah;

(a) Pendidikan Multikultural adalah sebuah filosofi yang menekankan pada makna penting, legitimasi dan vitalitas keragaman etnik dan budaya dalam membentuk kehidupan individu, kelompok maupun bangsa. (b) Pendidikan Multikultural adalah menginstitutionalkan sebuah filosofi pluralisme budaya ke dalam system pendidikan yang didasarkan pada prinsip-prinsip persamaan (equality), saling menghormati dan menerima, memahami dan adanya komitmen moral untuk sebuah keadilan sosial. (c) Pendidikan Multikultural adalah sebuah pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang didasarkan atas nilai-nilai demokratis yang mendorong berkembangnya pluralisme budaya; dalam hampir seluruh bentuk komprehensifnya. Pendidikan multikultural merupakan sebuah komitmen untuk meraih persamaan pendidikan, mengembangkan kurikulum yang menumbuhkan pemahaman tentang kelompok-kelompok etnik dan memberangus praktik-praktek penindasan. (d) Pendidikan Multikultural merupakan reformasi sekolah yang komprehensif dan pendidikan dasar untuk semua anak didik yang menentang semua bentuk diskriminasi dan intruksi yang menindas dan hubungan antar personal di dalam kelas dan memberikan prinsip-prinsip demokratis keadilan sosial.

Menurut pendapat Bloom,(Ekren & Keskin, N, 2017) pendidikan multibudaya sarat dengan penghargaan, penghormatan dan kebersamaan dalam suatu komunitas yang majemuk. Lebih lanjut Blum menegaskan bahwa pendidikan multibudaya meliputi sebuah pemahaman, penghargaan dan penilaian atas budaya seseorang, dan sebuah penghormatan dan keingintahuan tentang budaya etnis orang lain. Ia meliputi penilaian terhadap kebudayaan-kebudayaan orang lain, bukan dalam arti menyetujui seluruh aspek dari kebudayaan-kebudayaan tersebut, melainkan mencoba melihat bagaimana kebudayaan tertentu dapat mengekspresikan nilai bagi anggota-anggotanya sendiri (A. Lawrence Blum, 2001).

Problema Pendidikan Multikultural di Indonesia

Problema Pendidikan Multikultural di Indonesia memiliki keunikan yang tidak sama dengan problema yang dihadapi oleh negara lain. Problem ini mencakup hal-hal kemasyarakatan yang akan dipecahkan dengan Pendidikan Multikultural dan problem yang berkaitan dengan pembelajaran berbasis budaya. Problem tersebut dapat dijadikan bahan pengembangan Pendidikan Multikultural di Indonesia ini.

Problema kemasyarakatan pendidikan multikultural di Indonesia antara lain:

Keragaman Identitas Budaya Daerah

Keragaman ini menjadi modal sekaligus potensi konflik. Keragaman budaya daerah memang memperkaya khasanah budaya dan menjadi modal yang berharga untuk membangun Indonesia yang multicultural (Sipuan, Warsah, Amin, & Adisel, 2022). Namun kondisi budaya itu sangat berpotensi memecah belah dan menjadi lahan subur bagi konflik dan kecemburuan sosial. Masalah itu muncul jika tidak ada komunikasi antar budaya daerah. Tidak adanya komunikasi dan pemahaman pada berbagai kelompok budaya lain ini justru dapat menjadi konflik. Konflik-konflik yang terjadi selama ini di Indonesia dilatar belakangi oleh adanya keragaman identitas etnis, agama dan ras, misalnya peristiwa

Sampit. Keragaman ini dapat digunakan oleh provokator untuk dijadikan isu yang memancing persoalan. Dalam mengantisipasi hal itu, keragaman yang ada harus diakui sebagai sesuatu yang mesti ada dan dibiarkan tumbuh sewajarnya. Selanjutnya, diperlukan suatu manajemen konflik agar potensi konflik dapat terkoreksi secara dini untuk ditempuh langkah-langkah pemecahannya, termasuk didalamnya melalui Pendidikan Multikultural. Adanya Pendidikan Multikultural itu diharapkan masing-masing warga daerah tertentu bisa mengenal, memahami, menghayati dan bisa saling berkomunikasi.

Pergeseran Kekuasaan dari Pusat ke Daerah

Sejak dilanda arus reformasi dan demokratisasi, Indonesia dihadapkan pada beragam tantangan baru yang sangat kompleks. Satu diantaranya yang paling menonjol adalah persoalan budaya. Dalam arena budaya, terjadinya pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah membawa dampak besar terhadap pengakuan budaya lokal dan keragamannya. Bila pada masa Orde baru, kebijakan yang terkait dengan kebudayaan masih tersentralisasi, maka kini tidak lagi. Kebudayaan, sebagai sebuah kekayaan bangsa, tidak dapat lagi diatur oleh kebijakan pusat, melainkan dikembangkan dalam konteks budaya lokal masing-masing. Ketika sesuatu bersentuhan dengan kekuasaan maka berbagai hal dapat dimanfaatkan untuk merebut kekuasaan ataupun melanggengkan kekuasaan itu, termasuk didalamnya isu kedaerahan. Konsep “putra daerah” untuk menduduki pos-pos penting dalam pemerintahan sekalipun memang merupakan tuntutan yang demi pemerataan kemampuan namun tidak perlu diungkapkan menjadi sebuah ideologi. Tampilnya putra daerah dalam pos-pos penting memang diperlukan agar putra-putra daerah itu ikut memikirkan dan berpartisipasi aktif dalam membangun daerahnya. Harapannya tentu adalah adanya asas kesetaraan dan persamaan. Namun bila isu ini terus menerus dihembuskan justru akan membuat orang terkotak oleh isu kedaerahan yang sempit. Orang akan mudah tersulut oleh isu kedaerahan. Faktor pribadi (misalnya iri, keinginan memperoleh jabatan) dapat berubah menjadi isu publik yang destruktif ketika persoalan itu muncul diantara orang yang termasuk dalam putra daerah dan pendatang. Konsep pembagian wilayah menjadi propinsi atau kabupaten baru yang marak terjadi akhir-akhir ini selalu ditiup-tiupkan oleh kalangan tertentu agar mendapatkan simpati dari warga masyarakat. Mereka menggalang kekuatan dengan memanfaatkan isu kedaerahan ini. Warga menjadi mudah tersulut karena mereka berasal dari kelompok tertentu yang tertindas dan kurang beruntung.

Kurang Kokohnya Nasionalisme

Keragaman budaya ini membutuhkan adanya kekuatan yang menyatukan (integrating force) seluruh pluralitas negeri ini. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, kepribadian nasional dan ideologi negara merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar lagi dan berfungsi sebagai integrating force. Saat ini Pancasila kurang mendapat perhatian dan kedudukan yang semestinya sejak isu kedaerahan semakin semarak (Rosyad & Maarif, 2020; Sipuan et al., 2022). Persepsi sederhana dan keliru banyak dilakukan orang dengan menyamakan antara Pancasila itu dengan ideologi Orde Baru yang harus ditinggalkan.

Pada masa Orde Baru kebijakan dirasakan terlalu tersentralisasi, sehingga ketika Orde Baru tumbang, maka segala hal yang menjadi dasar dari Orde Baru dianggap jelek, perlu ditinggalkan dan diperbarui, termasuk di dalamnya Pancasila. Tidak semua hal yang ada pada Orde Baru jelek, sebagaimana halnya tidak semuanya baik. Ada hal-hal yang tetap perlu dikembangkan. Nasionalisme perlu ditegakkan namun dengan cara-cara yang edukatif, persuasif dan manusiawi bukan dengan pengerahan kekuatan. Sejarah telah menunjukkan peranan Pancasila yang kokoh untuk menyatukan kedaerahan ini. Bangsa Indonesia sangat membutuhkan semangat nasionalisme yang kokoh untuk meredam dan menghilangkan isu yang dapat memecah persatuan dan kesatuan bangsa ini.

Fanatisme Sempit

Fanatisme dalam arti luas memang diperlukan, namun yang salah yaitu fanatisme sempit, yang menganggap bahwa kelompoknyalah yang paling benar, paling baik dan kelompok lain harus dimusuhi. Gejala fanatisme sempit yang banyak menimbulkan korban ini banyak terjadi di tanah air ini (Mardia, Mukhtar. S, & Rohman, 2022). Gejala Bonek (bondo nekat) dikalangan suporter sepak bola nampak menggejala di tanah air. Kecintaan pada klub sepak bola daerah memang baik, tetapi kecintaan yang berlebihan terhadap kelompoknya dan memusuhi kelompok lain secara membabi buta maka hal ini justru tidak sehat. Terjadi pelemparan terhadap pemain lawan dan pengrusakan mobil dan benda-benda yang ada disekitar stadion ketika tim kesayangannya kalah menunjukkan gejala ini. Kecintaan dan kebanggaan pada korps memang baik dan sangat diperlukan, namun kecintaan dan kebanggaan itu bila ditunjukkan dengan bersikap memusuhi kelompok lain dan berperilaku menyerang kelompok lain maka fanatisme sempit ini menjadi hal yang destruktif. Terjadinya perseteruan dan perkelahian antara oknum aparat kepolisian dengan oknum aparat tentara nasional Indonesia yang kerap terjadi di tanah air ini juga merupakan contoh dari fanatisme sempit ini. Apalagi bila fanatisme ini berbaur dengan isu agama (misalnya di Ambon, Maluku dan Poso, Sulawesi Tengah), maka akan dapat menimbulkan gejala ke arah disintegrasi bangsa.

Konflik Kesatuan Nasional dan Multikultural

Ada tarik menarik antara kepentingan kesatuan nasional dengan gerakan multikultural. Di satu sisi ingin mempertahankan kesatuan bangsa dengan berorientasi pada stabilitas nasional. Namun dalam penerapannya, kita pernah mengalami konsep stabilitas nasional ini dimanipulasi untuk mencapai kepentingan-kepentingan politik tertentu. Adanya Gerakan Aceh Merdeka di Aceh dapat menjadi contoh ketika kebijakan penjagaan stabilitas nasional ini berubah menjadi tekanan dan pengerah kekuatan bersenjata. Hal ini justru menimbulkan perasaan anti pati terhadap kekuasaan pusat yang tentunya hal ini bisa menjadi ancaman bagi integrasi bangsa. Untunglah perbedaan pendapat ini dapat diselesaikan dengan damai dan beradab. Kini, semua pihak yang bertikai sudah bisa didamaikan dan diajak bersama-sama membangun daerah yang porak poranda akibat peperangan yang berkepanjangan dan terjangkit Tsunami ini.

Di sisi multikultural, kita melihat adanya upaya yang ingin memisahkan diri dari kekuasaan pusat dengan dasar pembenaran budaya yang berbeda dengan pemerintah pusat yang ada di Jawa ini, contohnya adalah gerakan OPM (Organisasi Papua Merdeka) di Papua. Namun ada gejala ke arah penyelesaian damai dan multikultural yang terjadi akhir-akhir ini. Salah seorang panglima perang OPM yang menyerahkan diri dan berkomitmen terhadap negara kesatuan RI telah mendirikan Kampung Bhineka Tunggal Ika di Nabire, Irian Jaya.

Kesejahteraan Ekonomi yang Tidak Merata di antara Kelompok Budaya

Kejadian yang nampak bernuansa SARA seperti Sampit beberapa waktu yang lalu setelah diselidiki ternyata berangkat dari kecemburuan sosial yang melihat warga pendatang memiliki kehidupan sosial ekonomi yang lebih baik dari warga asli. Jadi beberapa peristiwa di tanah air yang bernuansa konflik budaya ternyata dipicu oleh persoalan kesejahteraan ekonomi. Keterlibatan orang dalam demonstrasi yang marak terjadi di tanah air ini, apapun kejadian dan tema demonstrasi, seringkali terjadi karena orang mengalami tekanan hebat dibidang ekonomi. Bahkan ada yang demi selembar kertas dua puluh ribu orang akan ikut terlibat dalam demonstrasi yang dia sendiri tidak mengetahui maksudnya. Sudah banyak kejadian yang terungkap di media massa mengenai hal ini. Orang akan dengan mudah terintimidasi untuk melakukan tindakan yang anarkhis ketika himpitan ekonomi yang mendera mereka. Mereka akan menumpah kekesalan mereka pada kelompok-kelompok mapan dan dianggap menikmati kekayaan yang dia tidak mampu meraihnya. Hal ini nampak dari gejala perusakan mobil-mobil mewah yang dirusak oleh orang yang tidak bertanggung dalam berbagai peristiwa ditanah air ini. Mobil mewah menjadi simbol kemewahan dan keamanan yang menjadi kecemburuan sosial bagi kelompok tertentu sehingga akan cenderung dirusak dalam peristiwa kerusuhan. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari pun sering kita jumpai mobil-mobil mewah yang dicoreti dengan paku ketika mobil itu diparkir didaerah tertentu yang masyarakatnya banyak dari kelompok tertindas ini.

Keberpihakan yang Salah dari Media Massa, Khususnya Televisi Swasta dalam Memberitakan Peristiwa

Diantara media massa tentu ada ideologi yang sangat dijunjung tinggi dan dihormati. Persoalan kebebasan pers, otonomi, hak publik untuk mengetahui hendaknya diimbangi dengan tanggung jawab terhadap dampak pemberitaan. Mereka juga perlu mewaspadaai adanya pihak-pihak tertentu yang pandai memanfaatkan media itu untuk kepentingan tertentu, yang justru dapat merusak budaya Indonesia. Kasus perselingkuhan artis dengan oknum pejabat pemerintah yang banyak dilansir media massa dan tidak mendapat "hukuman yang setimpal" baik dari segi hukum maupun sanksi kemasyarakatan dapat menumbuhkan budaya baru yang merusak kebudayaan yang luhur. Memang berita semacam itu sangat layak jual dan selalu mendapat perhatian publik, tetapi kalau terus-menerus diberitakan setiap hari mulai pagi hingga malam hari maka hal ini akan dapat mempengaruhi orang untuk menyerap nilai-nilai negatif yang bertentangan dengan budaya

ketimuran. Kasus perceraian rumah tangga para artis yang tiap hari diudarakan dapat membentuk opini publik yang negatif, sehingga kesan kawin cerai di antara artis itu sebagai budaya baru dan menjadi trend yang biasa dilakukan. Orang menjadi kurang menghormati lembaga perkawinan. Sebaiknya isu kekayaan tidak menjadi isu yang selalu menjadi tema sinetron karena dapat mendidik orang untuk terlalu mengagungkan materi dan menghalalkan segala cara. Begitu juga tampilan yang seronok mengundang birahi, pengudaraan modus kejahatan baru atau pun iklan yang bertubi-tubi dapat menginspirasi orang melakukan sesuatu yang tidak pantas dilakukan. Televisi dan media massa harus membantu memberi bahan tontonan dan bacaan yang mendidihkan budaya yang baik. Karena menonton televisi dan membaca koran sudah menjadi tradisi yang kuat di negeri ini. Sehingga tontonan menjadi tuntunan, bukan tuntunan sekedar menjadi tontonan.

Ketika penggusuran gubuk liar yang memilukan ditampilkan dalam bentuk tangisan yang memilukan seorang anak atau orang tua yang dipadukan dengan tindakan aparat yang menyeret para gelandangan akan bermakna lain bagi pemirsa bila yang ditampilkan adalah para preman bertato yang melawan tindakan petugas pamong praja. Ironi itu nampak bila yang disorot yaitu tangisan bayi/orang tua dibandingkan dengan tato di lengan atau di punggung. Peristiwanya adalah penggusuran gubuk liar, tetapi simbol yang digunakan berbeda. Tangisan sebagai simbol kelemahan, ketidak berdayaan dan putus asa. Tato sering dikonotasikan secara salah sebagai simbol preman dan tindakan pemalakan. Televisi sangat mempengaruhi opini publik dalam menyorot berbagai peristiwa.

Menurut (Hasanah, Marini, & Maksun, 2021) mengemukakan beberapa masalah utama pendidikan di Indonesia antara lain:

Mahalnya Biaya pendidikan

Masalah utama pendidikan di Negeri ini yaitu mahalnya biaya pendidikan. Pendidikan bermutu itu mahal. Kalimat ini sering muncul untuk menjustifikasi mahalnya biaya yang harus dikeluarkan masyarakat untuk mengenyam bangku pendidikan dari Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Perguruan Tinggi (PT). Hal inilah yang kemudian banyak memunculkan fenomena putus sekolah dikalangan anak-anak Indonesia. Jangankan untuk sekolah Swasta, Untuk sekolah negeri pun, biaya pendidikanya tetap tinggi. Opsi bantuan BOS yang diberikan oleh pemerintah pun masih belum bisa mengatasi masalah mahalnya biaya pendidikan ini. Makin mahalnya biaya pendidikan sekarang ini tidak lepas dari kebijakan pemerintah yang menerapkan MBS (Manajemen Berbasis Sekolah). MBS di Indonesia pada realitas lebih dimaknai sebagai upaya untuk melakukan mobilisasi dana. Karena itu, Komite Sekolah/Dewan Pendidikan yang merupakan organ MBS selalu disyaratkan adanya unsur pengusaha (Dewi & Suryana, 2020). Asumsinya, pengusaha memiliki akses atas modal yang lebih luas. Hasilnya, setelah Komite Sekolah terbentuk, segala pungutan uang selalu berkedok, sesuai keputusan Komite Sekolah. Namun, pada tingkat implementasinya, ia tidak transparan, karena yang dipilih menjadi pengurus dan anggota Komite Sekolah adalah orang-orang dekat dengan Kepala Sekolah. Akibatnya, Komite Sekolah hanya menjadi legitimator kebijakan Kepala Sekolah, dan MBS pun hanya

menjadi legitimasi dari pelepasan tanggung jawab negara terhadap permasalahan pendidikan rakyatnya.

Rendahnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan

Sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan penyelenggaraan pendidikan. Dengan adanya kerusakan sarana dan prasarana ruang kelas dalam jumlah yang banyak, maka proses pendidikan tidak dapat berlangsung secara efektif. Akhir-akhir ini sudah banyak terdengar berita tentang sekolah roboh, atau sekolah rusak karena bangunannya yang sudah lapuk namun tidak mendapat bantuan dari pemerintah. Inilah salah satu bukti betapa rendahnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan di Indonesia.

Ketidak Jelasan Tujuan Pendidikan

Dalam undang-undang nomor 4 tahun 1950, telah di sebutkan secara jelas tentang tujuan pendidikan dan pengajaran yang pada intinya, ialah untuk membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air berdasarkan Pancasila dan kebudayaan kebangsaan Indonesia dst, namun dalam kenyataan yang terjadi terhadap tujuan pendidikan yang begitu ideal tersebut belum mampu menghasilkan manusia-manusia sebagaimana yang dimaksud dalam tumpukan kata-kata dalam rumusan tujuan pendidikan yang ada, bahkan terjadi sebaliknya, yakni terjadi kemerosotan moral, kehidupan yang kurang demokratis, terjadi kekacauan akibat konflik di masyarakat dan lain lain, hal ini merupakan suatu indikasi bahwa tujuan pendidikan selama ini belum dikatakan berhasil, mungkin disebabkan adanya ketidak jelasan atau kekaburan dalam memahami tujuan pendidikan yang sebenarnya.

Ketidak Serasian Kurikulum

Kebanyakan kurikulum yang dipergunakan di sekolah-sekolah masih berisi tentang mata pelajaran-mata pelajaran yang beraneka ragam, sejumlah jam-jam pelajaran dan nama-nama buku pegangan untuk setiap mata pelajaran. Sehingga pengajaran yang berlangsung kebanyakan menanamkan teori-teori pengetahuan melulu, akibatnya para lulusan yang dihasilkan kurang siap pakai bahkan miskin keterampilan dan tidak mempunyai kemampuan untuk berproduktifitas ditengah-tengah masyarakatnya, karena muatan kurikulum yang diterima di sekolah-sekolah memang tidak dipersiapkan untuk menjadikan lulusan dari peserta didik untuk dapat mandiri dimasyarakatnya.

Ketiadaan Tenaga Pendidik Yang Tepat dan Cakap

Guru sebagai pilar penunjang terselenggaranya suatu sistem pendidikan, merupakan salah satu komponen strategis yang juga perlu mendapatkan perhatian oleh negara, misalnya dalam hal penempatan guru, bahwa hingga sekarang ini jumlah guru dirasakan oleh masyarakat maupun pemerintah sendiri masih sangat kurang. Kurangnya jumlah guru ini jelas merupakan persoalan serius karena guru adalah ujung tombak pendidikan. Kekurangan tersebut membuat beban guru semakin bertumpuk sehingga sangat berpotensi mengakibatkan menurunnya kualitas pendidikan. Masih banyak

dijumpainya suatu slogan yang berbunyi “tak ada rotan akarpun jadi”, menunjukkan suatu gambaran betapa rendahnya kualitas tenaga kependidikan yang ada, karena harus dipegang oleh tenaga-tenaga pendidikan yang bukan dari ahlinya. Padahal menugaskan dan mendudukan seseorang sebagai pendidik yang tidak dibina atau dibekalnya ilmu kependidikan dan yang bukan dalam bidangnya, sangatlah menimbulkan kerugian yang sangat besar, diantaranya terjadinya pemborosan biaya, terjadinya pemerosotan mutu hasil pendidikan, lebih jauh lagi akan mempersiapkan warga masyarakat dimasa mendatang dengan pribadi-pribadi yang memiliki kualitas rendah sehingga tak mampu bersaing dalam kehidupan yang serba problematis. Sudah selayaknya profesi sebagai seorang pendidik membutuhkan kompetensi yang terintegrasi baik secara intelektual-akademik, sosial, pedagogis, dan profesionalitas yang kesemuanya berlandaskan pada sebuah kepribadian yang utuh pula, sehingga dalam menjalankan fungsinya sebagai pendidik senantiasa dapat mengembangkan model-model pembelajaran yang efektif, inovatif, dan relevan.

Adanya Pengukuran Yang Salah Ukur

Dalam masalah pengukuran terhadap hasil belajar yang sering disebut dengan istilah ujian atau evaluasi, ternyata dalam prakteknya terjadi ketidak serasian antara angka-angka yang diberikan kepada anak didik sering tidak obyektif, dimana pencantuman angka-angka nilai yang begitu tinggi sama sekali tidak sepadan dengan mutu riil pemegang angka-angka nilai itu. Ketika mereka diterjunkan ke masyarakat, tidak mampu berbuat apa-apa yang setaraf dengan tingkat pendidikannya. Jelasnya tanpa adanya pengukuran yang obyektif dapat dipastikan tidak akan pernah terwujud tujuan pendidikan yang sebenarnya. Contoh lainnya yaitu pendidikan berorientasi hasil, nilai UN yang menjadi standar kelulusan. Siswa bisa dinyatakan lulus apabila telah memenuhi nilai minimal UN, tak peduli bagaimana hasil belajar siswa selama tiga tahun. Hasil akhir berupa Nilai UN menjadi harga mati bagi para siswa untuk bisa lulus namun tidak mengindahkan bagaimana cara mereka mendapatkan nilai itu. Setiap kali UN mau digelar, entah dari mana datangnya tiba-tiba saja tersebar bocoran jawaban UN padahal UN sendiri belum dilaksanakan. pendidikan kita tak peduli proses bagaimana mereka bisa mencapai hasil tapi lebih menyukai hasilnya. Pendidikan semacam ini sebenarnya secara tidak langsung mengajar pada siswa bahwa apapun cara selama bisa mencapai hasil yang baik maka itu sah-sah saja. Jadi, jangan salahkan siswa yang ketika sudah besar mendadak jadi koruptor karena mereka “sukses” menimba ilmu tentang pendidikan hasil, apapun caranya yang penting bisa kaya. Terkait dengan kondisi pendidikan di Indonesia, Abdul Malik Fadjar (Mendiknas tahun 2001) mengakazui kebenaran penilaian bahwa sistem pendidikan di Indonesia adalah yang terburuk dikawasan Asia. Ia mengingatkan, pendidikan sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial politik, termasuk persoalan stabilitas dan keamanan, sebab pelaksanaan pendidikan membutuhkan rasa aman. Salah satu prasarat untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera adalah lebih ditentukan oleh sejauh mana kualitas sumber daya masyarakatnya. Kualitas suatu bangsa sangat ditentukan oleh peran serta

mutu pendidikan yang dipergunakan oleh bangsa tersebut. Masyarakat yang berperadaban adalah masyarakat yang berpendidikan.

4. KESIMPULAN

Problema Pendidikan Multikultural di Indonesia memiliki keunikan yang tidak sama dengan problema yang dihadapi oleh negara lain. Problem ini mencakup hal-hal kemasyarakatan yang akan dipecahkan dengan Pendidikan Multikultural dan problem yang berkaitan dengan pembelajaran berbasis budaya. Beberapa problema kemasyarakatan Pendidikan multikultural yang ada di Indonesia yaitu keragaman identitas budaya daerah, pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah, kurang kokohnya nasionalisme, fanatisme sempit, konflik kesatuan nasional dan multikultural, kesejahteraan ekonomi yang tidak merata diantara kelompok budaya dan keterpihakan yang salah dari media massa, khususnya televisi swasta dalam memberitakan peristiwa.

5. REFERENSI

- A. Lawrence Blum, A. (2001). *Multikulturalisme, dan Komunitas Antar Ras, Tiga Nilai Yang bersifat Mendidik Bagi Sebuah Masyarakat Multikultural, dalam Larry May, dan Shari Colins-Chobanian, Etika Terapan: Sebuah Pendekatan Multikultural, Alih Bahasa: Sinta Carolina dan Dadang Rusbian*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Bank, J. A. (1990). *Handbook of Research on Multicultural Education*". Education Word. Retrieved from <http://www.educationworld.com>.
- Dewi, I., & Suryana, D. (2020). Analisis Evaluasi Kinerja Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini di PAUD Al Azhar Bukittinggi. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 4(2), 1051. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v4i2.465>
- Ekren, G., & Keskin, N, O. (2017). Using The Revised Bloom Taxonomy In Designing of the Interrelationships between Motivation, Engagment, and Complex Problem Solving in Game-Based Learning. *Educational Technology & Society*, 17, 42-53.
- Fadli, S. (2021). "Dampak Kajian Keagamaan Dalam Pembentukan Genarasi Berbudaya Unggul Di Era Digital". *Jurnal Kajian Agama Hukum Dan Pendidikan Islam (KAHPI)*, 2(2), 42. <https://doi.org/10.32493/kahti.v2i2.p42-50.9448>
- H.A.R, T. (2013). *Kekuasaan dan Pendidikan Indonesia Tera*. Magelang: Indonesia Tera.
- Halimatussa'diyah, H. (2019). NILAI-NILAI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM MULTIKULTURAL DALAM DUNIA TAREKAT. *PENDIDIKAN MULTIKULTURAL*. <https://doi.org/10.33474/multikultural.v3i2.4755>
- Hasanah, U., Marini, A., & Maksum, A. (2021). Multicultural education-oriented digital teaching materials to improve students' pluralist attitudes. *Jurnal Prima Edukasia*, 9(1), 118–126. <https://doi.org/10.21831/jpe.v9i1.35503>
- Khairuddin, A., & Si, M. (2018). Epistemologi Pendidikan Multikultural Di Indonesia. *Ijtimaiah*, 2(1).
- Mardia, Mukhtar. S, M., & Rohman, R. (2022). Analisis Pembelajaran Fikih Berbasis Pendidikan Multikultural Di Mts Ddi Kaballangan Kabupaten Pinrang. *Edu Global :*

- Jurnal Pendidikan Islam*, 3(1), 46–56. <https://doi.org/10.56874/eduglobal.v3i1.845>
- Nugroho, M. A. (2016). Pendidikan Islam Berwawasan Multikultural; Sebuah Upaya Membangun Pemahaman Keberagaman Inklusif pada Umat Muslim. *MUDARRISA: Jurnal Kajian Pendidikan Islam*, 8(1), 31–60. <https://doi.org/10.18326/mdr.v8i1.31-60>
- Rosyad, A. M., & Maarif, M. A. (2020). Paradigma Pendidikan Demokrasi Dan Pendidikan Islam Dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi Di Indonesia. *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(1), 75–99. <https://doi.org/10.31538/nzh.v3i1.491>
- Salsabila, S. S., Rohmadani, A. I., Mahmudah, S. R., Fauziah, N., & Sholihatien, R. A. N. (2022). TANTANGAN PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DI INDONESIA DI ZAMAN SERBA DIGITAL. *Jurnal Pendidikan Dan Dakwah*, 2(1), 99–110.
- Sipuan, S., Warsah, I., Amin, A., & Adisel, A. (2022). Pendekatan Pendidikan Multikultural. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 8(2), 815. <https://doi.org/10.37905/aksara.8.2.815-830.2022>
- Sitompul, J. (2008). "Pasal untuk Menjerat Penyebar Kebencian SARA di Jejaring Sosial.
- Sudargini, Y., & Purwanto, A. (2020). Pendidikan Pendekatan Multikultural Untuk Membentuk Karakter dan Identitas Nasional di Era Revolusi Industri 4.0 : A Literature Review. *Journal Industrial Engineering & Management Research (Jiemar)*, 1(3), 2722–8878. <https://doi.org/10.7777/jiemar>
- Suparta, M. (2008). *Islamic Multicultural Education: Sebuah Refleksi atas pendidikan Agama Islam di Indonesia*. Jakarta: Al Ghazali Center.